



Dampak Agama dalam Kebijakan Politik: Studi Teologis Kitab 2 Raja-Raja

Benediktus James Widya Darmaka,^{1*} Suranto,² Yenny Herawati Yohana Heylen Erlina,³ Jeffry Hendra Lesmana⁴
Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

ARTICLE INFO

Email Correspondence

benediktusdarmakajurnal@gmail.com

Keywords:

Religion, Political Policy, 2 Kings, Hermeneutics, Legitimacy.

Kata Kunci:

Agama, Kebijakan Politik, 2 Raja-Raja, Hermeneutika, Legitimasi.

Waktu Proses

Submit : 31/12/2025

Terima : 17/02/2026

Publish : 31/03/2026

Doi :

10.63536/arastamar.v2i1.88



Copyright:

©2026. The Authors.

License: Open Journals Publishing. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License.

Abstract: This study analyzes the influence of religion, particularly the worship of God and religious practices, on the political policies of kings as depicted in the Book of 2 Kings. The research aims to explore the relationship between religious beliefs and political actions, providing insights into how religion can serve as a tool for legitimizing power and influence within a social context. The methodology employed includes hermeneutic analysis and literature review, focusing on scriptural texts and historical contexts. The findings reveal that the adherence to religious mandates significantly shaped the decisions of rulers, impacting their governance and societal order. This study contributes to understanding the role of religion in contemporary pluralistic societies, highlighting its ongoing relevance.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh agama, khususnya penyembahan kepada Tuhan dan praktik keagamaan, terhadap kebijakan politik para raja yang terdapat dalam Kitab 2 Raja-Raja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara keyakinan religius dan tindakan politik, memberikan wawasan tentang bagaimana agama dapat menjadi alat untuk legitimasi kekuasaan dan pengaruh dalam konteks sosial. Metodologi yang digunakan meliputi analisis hermeneutik dan tinjauan literatur, dengan fokus pada teks-teks kitab suci dan konteks sejarah. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap mandat religius secara signifikan membentuk keputusan para penguasa, mempengaruhi tata kelola dan tatanan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran agama di masyarakat pluralistik kontemporer, menyoroti relevansinya yang terus berlanjut.

Pendahuluan

Kitab 2 Raja-Raja merupakan salah satu bagian penting dalam Alkitab yang mencatat sejarah panjang pemerintahan raja-raja Israel dan Yehuda. Dalam catatan ini, kita dapat melihat bagaimana tindakan dan keputusan yang diambil oleh para raja sering kali dipengaruhi oleh keyakinan religius mereka. Misalnya, raja-raja yang setia kepada Tuhan sering kali mengalami keberhasilan dalam pemerintahan mereka, sedangkan raja-raja yang menyimpang dari jalan Tuhan cenderung menghadapi kehancuran. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan pribadi, tetapi juga sebagai legitimasi bagi kekuasaan politik. Dalam konteks ini, kita dapat merujuk pada 1 Raja-Raja 15:11 yang menyatakan bahwa “Aza melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud, ayahnya”. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dapat membawa berkah dalam pemerintahan.

Pengaruh agama dalam politik, merupakan fenomena yang kompleks.¹ Dalam banyak kasus, keyakinan religius digunakan untuk membenarkan tindakan politik, baik yang positif maupun negatif. Misalnya, raja Manasye dari Yehuda, yang tercatat dalam 2 Raja-Raja 21, melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan, termasuk menyembah berhala dan mengorbankan anak-anaknya. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan penyimpangan dari ajaran Tuhan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dapat disalahgunakan dengan mengabaikan nilai-nilai moral yang diajarkan agama.² Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa meskipun agama dapat menjadi sumber legitimasi, ia juga dapat dimanipulasi untuk mendukung kebijakan yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya, penting untuk menganalisis bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam konteks pluralisme agama di dunia modern. Dalam banyak masyarakat saat ini, keberagaman keyakinan dan praktik religius menjadi hal yang umum.³ Hal ini menuntut adanya dialog dan pemahaman yang lebih dalam antara berbagai kelompok agama. Dalam Kitab 2 Raja-Raja, kita dapat melihat bagaimana raja-raja Israel sering kali berhadapan dengan tantangan dari bangsa-bangsa lain yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Misalnya, ketika raja Ahab menikahi Izebel, seorang putri dari raja Sidon yang menyembah Baal, ia membawa pengaruh asing ke dalam Israel yang menyebabkan banyak orang berpaling dari Tuhan. Ini memberikan

¹ Nicole Reinhardt, “Just War, Royal Conscience and the Crisis of Theological Counsel in the Early Seventeenth Century,” *Journal of Early Modern History* 18, no. 5 (2014): 495–521, <https://doi.org/10.1163/15700658-12342427>.

² Brian Robert Calfano and William Umphres, “Religion Applied to Government: Navigating Competing and Complementary Spheres of Power,” *Religion* 13, no. 11 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.3390/rel13111041>.

³ Rezeki Putra Gulo et al., “Membentuk Identitas Kristen Yang Toleran : Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Kebhinekaan,” *Jurnal Teologi Amreta* 8, no. 2 (2024): 1–27, <https://doi.org/10.54345/jta.v8i1.166>.

gambaran bahwa interaksi antara berbagai keyakinan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik dan keputusan politik.

Dalam konteks sejarah dan kontemporer, penting untuk memahami bagaimana agama membentuk kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, keputusan politik yang diambil oleh pemimpin sering kali didasarkan pada nilai-nilai religius yang dianut oleh mereka. Dalam 2 Raja-Raja 23, raja Yosia melakukan reformasi besar-besaran dengan menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala dan mengembalikan ibadah yang benar kepada Tuhan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen religiusnya, tetapi juga menunjukkan bagaimana keyakinan dapat mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.⁴ Kita dapat melihat paralel dengan situasi saat ini di mana pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai agama dalam kebijakan mereka sering kali mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat.

Isu tentang Agama dan Politik telah dielaborasi oleh beberapa penelitian sebelumnya. Nikarni Zai dan Junidar Gulo dalam penelitiannya mengkaji panggilan umat Kristen dalam politik. Zai menegaskan bahwa pelayanan Umat Kristen dalam kaitannya dengan politik mesti disertai dengan integritas dan kasih.⁵ Djoys Anake Rantung dalam risetnya mengkaji hubungan antara Pendidikan Agama Kristen dan Politik dalam kehidupan masyarakat Majemuk.⁶ Sementara itu, BS Sidjabat dalam artikelnya mengkaji pendidikan politik dengan berfokus pada materi ajar di perguruan tinggi umum di Indonesia.⁷

Mengacu pada penelitian terdahulu di atas, penelitian ini tidak mengulang kembali isu yang sama, melainkan akan mengeksplorasi hubungan antara agama dan politik dalam Kitab 2 Raja-Raja yang memberikan gambaran tentang bagaimana keyakinan religius dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan para pemimpin. Dari contoh-contoh yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan pribadi, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat membentuk kebijakan publik. Dalam dunia modern yang semakin pluralistik, penting untuk memahami dan menghargai perbedaan keyakinan, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dinamika politik. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14:34, "Keadilan mengangkat suatu bangsa, tetapi dosa adalah kecemasan bagi bangsa-

⁴ Kurniawan Arif Maspul, "Faith, Politics, and Democracy: Unraveling Historical and Contemporary Dynamics in Religious Influences on Electoral Processes," *Religion and Policy Journal* 1, no. 2 (2023): 61–65, <https://doi.org/10.15575/rpj.v1i2.628>.

⁵ Nikarni Zai and Junidar Gulo, "Panggilan Kristen Dalam Politik: Melayani Dengan Integritas Dan Kasih," *Imitatio Christo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2025): 30–45, <https://doi.org/10.63536/imitatiochristo.v1i1.4>.

⁶ Djoys Anake Rantung, "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia," *Jurnal Shanan* 1, no. 2 (2017): 58–73, <https://doi.org/10.33541/shanan.v1i2.1492>.

⁷ Binsen S. Sidjaba, "Pendidikan Politik: Telaah Materi Ajar Pak Di Perguruan Tinggi Umum," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.20>.

bangsa". Ini menegaskan bahwa tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan religius dapat membawa kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak agama terhadap kebijakan politik para raja dalam Kitab 2 Raja-Raja melalui pendekatan hermeneutik.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik dan tinjauan literatur⁸ untuk menganalisis pengaruh agama dalam kebijakan politik yang tercatat dalam Kitab 2 Raja-Raja. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini meliputi: pertama, pengumpulan data dari teks-teks Kitab Suci, terutama yang berkaitan dengan tindakan politik raja-raja Israel dan Yehuda; kedua, analisis hermeneutik terhadap ayat-ayat yang relevan untuk memahami konteks historis dan religiusnya; ketiga, tinjauan literatur untuk menelaah penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh agama dalam politik; dan keempat, sintesis hasil analisis untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi tema ini dalam konteks pluralisme agama saat ini.⁹ Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai keterkaitan antara agama dan kebijakan politik.

Hasil dan Pembahasan

Penyembahan kepada Tuhan sebagai Legitimasi Kekuasaan

Dalam 2 Raja-Raja 18:3-6, kita melihat bagaimana raja Hizkia dipuji karena melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, mengikuti jejak raja Daud yang terkenal.¹⁰ Dalam konteks ini, penyembahan kepada Tuhan bukan hanya sekadar tindakan religius, tetapi juga menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan seorang raja. Hizkia mengambil langkah berani dengan menghapus tempat-tempat penyembahan asing yang ada di kerajaannya, sebuah tindakan yang tidak hanya mencerminkan komitmennya terhadap Tuhan, tetapi juga menciptakan stabilitas politik di antara rakyatnya.¹¹ Dalam masyarakat yang mengandalkan kepercayaan agama, tindakan seperti ini dapat mendatangkan dukungan yang luas dari rakyat, yang melihat raja mereka sebagai pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam hal ini, Hizkia menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan dalam pemerintahan

⁸ Colin Holmes and David Lindsay, "In Search of Christian Theological Research Methodology," *Sage Open* 8, no. 4 (2018): 01-09, <https://doi.org/10.1177/2158244018809214>.

⁹ Robin Gallaher Branch, "Athaliah, a Treacherous Queen: A Careful Analysis of Her Story in 2 Kings 11 and 2 Chronicles 22:10-23:21: Research Article," *In Die Skriflig* 38, no. 4 (2004): 537-59, <https://doi.org/10520/EJC108082>.

¹⁰ Paul R. House, *1, 2 Kings: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture* (USA: B&H Publishing Group, 1995), 349.

¹¹ Joel E. Anderson and Pieter M. Venter, "Isaiah 36-39: Rethinking the Issues of Priority and Historical Reliability," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 65, no. 1 (2009): 49-55, <https://doi.org/10.4102/hts.v65i1.123>.

bukan hanya memberikan legitimasi, tetapi juga memberikan kekuatan bagi pemimpin untuk memimpin dengan adil dan bijaksana.

Penting untuk dicatat bahwa legitimasi kekuasaan melalui penyembahan kepada Tuhan tidak hanya terjadi pada masa Hizkia, tetapi juga merupakan tema yang berulang dalam sejarah Israel. Sebagai contoh, raja Salomo, yang dikenal karena kebijaksanaannya, juga mengandalkan hubungan yang kuat dengan Tuhan untuk memperkuat posisinya sebagai raja. Dalam 1 Raja-Raja 3:5-14, Salomo berdoa kepada Tuhan meminta hikmat untuk memerintah rakyatnya dengan baik.¹² Tuhan pun mengabulkan permohonan Salomo dan memberinya hikmat yang luar biasa, yang membuatnya dihormati dan diakui sebagai raja yang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa penyembahan dan ketergantungan kepada Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan dan legitimasi yang penting bagi seorang pemimpin. Ketika seorang raja memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, ia tidak hanya mendapatkan dukungan spiritual tetapi juga menginspirasi kepercayaan dan rasa hormat di mata rakyatnya.

Penyembahan kepada Tuhan juga berfungsi sebagai pengingat bagi raja dan rakyat tentang tanggung jawab moral mereka.¹³ Dalam konteks Hizkia, tindakan menghapus tempat-tempat penyembahan asing bukan hanya langkah politik, tetapi juga merupakan panggilan untuk kembali kepada ajaran dan perintah Tuhan. Dalam Ulangan 6:5, Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk mengasihi-Nya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Dengan menghapus praktik penyembahan yang tidak sesuai, Hizkia mengajak rakyatnya untuk kembali kepada inti dari ajaran Tuhan, yang pada gilirannya memperkuat identitas nasional dan spiritual mereka. Hal ini menciptakan kesatuan di antara rakyat, di mana mereka merasa terhubung dengan Tuhan dan pemimpin mereka dalam satu tujuan yang sama.

Mengenai hubungan antara penyembahan dan legitimasi kekuasaan dapat dilihat dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh tindakan Hizkia. Ketika raja berkomitmen untuk mengikuti jalan Tuhan, hal ini tidak hanya berdampak pada kondisi spiritual masyarakat, tetapi juga menciptakan ketahanan sosial dan politik.¹⁴ Dalam konteks sejarah, banyak raja yang gagal mempertahankan kekuasaan mereka ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Misalnya, raja-raja yang menyembah dewa-dewa asing sering kali mengalami pemberontakan dan konflik internal yang melemahkan kekuasaan mereka. Sebaliknya, raja yang setia kepada Tuhan, seperti Hizkia, sering kali menikmati masa pemerintahan yang damai dan stabil, yang memungkinkan mereka untuk membangun infrastruktur dan memperkuat ekonomi negara. Oleh karena itu, hubungan antara penyembahan kepada Tuhan dan legitimasi

¹² House, *1, 2 Kings : An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture*, 109.

¹³ Janusz Lemański, "Hezekiah and the Centralization of Worship (2 Kgs 18: 4.22)," *Collectanea Theologica* 92, no. 1 (2022): 29–62, <https://doi.org/10.21697/ct.2022.92.1.02>.

¹⁴ Ananda Geyser-Fouche, "1 and 2 Chronicles as a Discourse of Power," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8011>.

kekuasaan bukan hanya bersifat teoritis, tetapi dapat dilihat dari hasil konkret dalam sejarah.

Penyembahan kepada Tuhan berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan yang kuat bagi seorang pemimpin, seperti yang terlihat dalam tindakan raja Hizkia. Melalui komitmennya untuk menghapus tempat-tempat penyembahan asing dan kembali kepada ajaran Tuhan, Hizkia tidak hanya mendapatkan dukungan rakyat, tetapi juga menciptakan stabilitas politik dan sosial. Contoh dari raja-raja sebelumnya, seperti Salomo, menunjukkan bahwa ketergantungan pada Tuhan dapat menghasilkan hikmat dan keberhasilan dalam pemerintahan. Dengan demikian, penyembahan kepada Tuhan menjadi lebih dari sekadar praktik religius; ia adalah fondasi moral dan spiritual yang memperkuat legitimasi kekuasaan dan menciptakan masyarakat yang bersatu dan sejahtera. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 21:1, "Hati raja seperti aliran air di tangan Tuhan; Dia membalikkan ke mana saja Dia kehendaki," menunjukkan bahwa pengaruh Tuhan dalam kehidupan seorang pemimpin sangat menentukan arah kepemimpinannya.

Konsekuensi dari Penyimpangan Agama

Dalam sejarah bangsa Israel, raja Manasye adalah contoh nyata dari dampak negatif penyimpangan agama. Dalam kitab 2 Raja-Raja 21:1-6, kita dapat melihat bagaimana Manasye, yang memerintah selama lima puluh lima tahun, melakukan berbagai tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan.¹⁵ Dia tidak hanya membangun tempat-tempat penyembahan bagi dewa-dewa asing, tetapi juga terlibat dalam praktik-praktik yang sangat merusak, seperti pengorbanan anak-anak. Tindakan ini mencerminkan sebuah pengabaian terhadap nilai-nilai moral yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan ini tidak hanya menimbulkan kemarahan Tuhan, tetapi juga menciptakan keruntuhan moral dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan Manasye bisa dilihat sebagai sebuah pengingat bahwa penyimpangan dari ajaran agama dapat mengakibatkan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran individu; hal ini dapat merusak tatanan sosial dan politik suatu bangsa.

Penting untuk memahami bahwa agama sering kali berfungsi sebagai pilar moral dalam masyarakat. Justina N. Osaji dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ketika praktik keagamaan yang benar diabaikan, masyarakat cenderung mengalami ketidakstabilan.¹⁶ Misalnya, ketika masyarakat tidak lagi menghargai nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, maka akan muncul perilaku yang merugikan, baik secara individu maupun kolektif. Hal ini tercermin dalam banyak peristiwa sejarah di mana krisis moral sering kali diikuti oleh krisis politik. Dalam konteks ini, kita dapat mengaitkan pernyataan dalam Amsal

¹⁵ House, *1, 2 Kings : An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture*, 377.

¹⁶ Justina Nwazuni Osajie, "Religious Leaders as Agents of Peace and Security for Sustainable Development in Nigeria," *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 21, no. 3 (2021): 260–73, <https://doi.org/10.4314/ujah.v21i3.15>.

14:34, yang menegaskan bahwa kebenaran mengangkat suatu bangsa, tetapi dosa adalah penghancur bagi bangsa-bangsa. Ketika bangsa-bangsa menjauh dari kebenaran, mereka berisiko mengalami keruntuhan yang sama seperti yang dialami oleh Israel pada masa pemerintahan Manasye.

Ketidakstabilan yang dihasilkan dari penyimpangan agama tidak hanya berdampak pada tatanan sosial, tetapi juga pada hubungan antar individu dalam masyarakat. Ketika nilai-nilai moral mulai pudar, akan muncul kecenderungan untuk saling curiga dan tidak percaya.¹⁷ Misalnya, dalam konteks masyarakat modern, kita sering kali menyaksikan meningkatnya tingkat kejahatan dan ketidakadilan sosial. Hal ini dapat dihubungkan dengan hilangnya rasa tanggung jawab moral yang seharusnya ditegakkan oleh norma-norma agama. Dalam hal ini, kita dapat merujuk pada Matius 5:13-16, di mana Yesus mengajarkan bahwa para pengikut-Nya adalah garam dan terang dunia. Ketika pengikut agama tidak lagi berfungsi sebagai garam yang memberikan rasa dan terang yang menerangi, masyarakat akan terjerumus ke dalam kegelapan dan kehampaan moral.

Selanjutnya, penyimpangan agama juga dapat berkontribusi pada konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat. Ketika ajaran agama digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau diskriminasi, hal ini akan menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.¹⁸ Sebagai contoh, dalam banyak kasus di mana agama digunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, kita sering melihat munculnya ketegangan antar kelompok. Dalam konteks ini, kita dapat mengingat kembali peringatan dalam Yakobus 3:16¹⁹ yang menyatakan bahwa di mana ada iri hati dan perselisihan, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika agama disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini tidak hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat.

Dari analisis di atas, jelas bahwa penyimpangan dari ajaran agama memiliki konsekuensi yang sangat serius. Tindakan raja Manasye adalah contoh konkret bagaimana sebuah keputusan yang salah dapat mempengaruhi seluruh bangsa. Masyarakat yang tidak lagi berpegang pada nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama akan mengalami keruntuhan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari moralitas individu hingga stabilitas sosial dan politik.²⁰ Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan komunitas untuk kembali kepada ajaran agama yang benar dan

¹⁷ Chioma P. Onuorah, "Religious Aberration in Nigerian Contemporary Society : A Critique," *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1-7, <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7395>.

¹⁸ Seprianus L. Padakari and Rezeki Putra Gulo, "Teologi Dan Keadilan Sosial : Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global," *Jurnal Tumou Tou* 12, no. 1 (2025): 41-52, <https://doi.org/10.51667/tt.v12i1.1973>.

¹⁹ Hendra Winarjo, "Jesus Christ as The Embodiment of the Wisdom of God: A Theological Commentary on James 3:13-18," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 22, no. 2 (2023): 303-319, <https://doi.org/10.36421/veritas.v22i2.539>.

²⁰ Zai and Gulo, "Panggilan Kristen Dalam Politik: Melayani Dengan Integritas Dan Kasih," 30.

menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kita diingatkan akan pentingnya menjaga integritas moral yang telah ditetapkan oleh Tuhan agar kita dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian.

Penyimpangan agama tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas bagi masyarakat dan negara.²¹ Dari kisah raja Manasye, kita belajar bahwa tindakan yang melawan ajaran Tuhan dapat mengakibatkan keruntuhan moral yang parah dan ketidakstabilan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat menjauh dari nilai-nilai agama, mereka berisiko mengalami krisis yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga ajaran agama sebagai panduan dalam kehidupan, agar kita dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 6:11-12, kita diajak untuk mengejar kebenaran, kesalehan, dan iman, yang merupakan fondasi bagi kehidupan yang bermoral dan harmonis.

Peran Nabi dalam Memengaruhi Kebijakan Raja

Nabi-nabi dalam sejarah Israel, khususnya yang tercatat dalam Kitab 2 Raja-Raja, memegang peranan penting dalam membentuk kebijakan dan tindakan para raja. Mereka bukan hanya sekadar penyampai pesan Tuhan, tetapi juga berfungsi sebagai penasihat moral dan spiritual yang membantu para pemimpin untuk memahami tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan dan rakyat. Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana nabi Yesaya dan Elisa, di antara nabi-nabi lainnya, berkontribusi signifikan terhadap keputusan-keputusan politik yang diambil oleh raja-raja Israel dan Yehuda. Misalnya, dalam situasi yang dihadapi oleh Raja Hizkia, kita dapat melihat betapa pentingnya peran nabi dalam memberikan arahan yang jelas dan tepat waktu.

Ketika Raja Hizkia menghadapi ancaman dari Sanherib, raja Asyur, ia tidak ragu untuk mengirim utusan kepada nabi Yesaya untuk meminta petunjuk Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 19:2, Hizkia mengakui bahwa dia membutuhkan bimbingan ilahi untuk menghadapi situasi yang mengancam keberlangsungan kerajaannya. Permintaan ini mencerminkan kesadaran Hizkia akan keterbatasan manusia dan pentingnya mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan besar. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Tuhan dan raja melalui nabi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dan signifikan terhadap keputusan politik.²² Ketika raja mendengarkan dan mengikuti nasihat nabi, sering kali hasilnya adalah kemenangan dan pemulihan bagi bangsa.

²¹ Padakari and Gulo, "Teologi Dan Keadilan Sosial : Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global," 41.

²² Blessing Onoriode Boloje, "Trading Yahweh's Word for a Price : Ethical Implications of the Collusion of Prophets and Priests," *Old Testament Essays* 3, no. 3 (2018): 630–50, <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2018/v31n3a13>.

Peran nabi sebagai penegur dan penasihat tidak hanya terbatas pada situasi krisis. Nabi sering kali dihadapkan pada tugas untuk mengingatkan raja tentang tanggung jawab moral dan spiritual mereka. Dalam banyak kasus, nabi mengingatkan raja tentang pentingnya keadilan, kebenaran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Hal ini terlihat dalam tindakan nabi Elisa yang memberikan peringatan kepada Raja Yoram tentang konsekuensi dari keputusannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.²³ Nabi sering kali berfungsi sebagai suara moral dalam masyarakat yang mungkin telah menyimpang dari jalan yang benar. Dalam hal ini, nabi berperan sebagai pengingat akan komitmen mereka kepada Tuhan dan kepada rakyat yang mereka pimpin.

Contoh lain dari pengaruh nabi terhadap kebijakan raja dapat dilihat dalam kisah Nabi Natan dan Raja Daud. Ketika Daud melakukan dosa berat dengan mengambil istri Uria dan membunuh Uria, Natan diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud. Dalam 2 Samuel 12, Natan menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud, yang pada akhirnya menyadarkan Daud akan kesalahannya. Peringatan ini bukan hanya berfungsi untuk mengoreksi tindakan Daud, tetapi juga untuk mengembalikan Daud ke jalan yang benar di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa nabi bukan hanya berfungsi sebagai juru bicara, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa raja kembali kepada kehendak Tuhan.

Dalam konteks yang lebih luas, pengaruh nabi dalam kebijakan raja juga mencerminkan hubungan antara kekuasaan politik dan spiritualitas. Ketika raja mendengarkan suara Tuhan melalui nabi, mereka lebih mungkin untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Sebaliknya, ketika mereka mengabaikan nasihat nabi, sering kali berujung pada kehancuran dan penyesalan.²⁴ Ini tercermin dalam sejarah Israel dan Yehuda, di mana banyak raja yang gagal mendengarkan nasihat nabi mengalami kejatuhan dan bencana. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin saat ini untuk memahami nilai dari mendengarkan suara Tuhan dan mencari bimbingan ilahi dalam setiap keputusan yang diambil.

Peran nabi dalam memengaruhi kebijakan raja sangatlah signifikan dan tidak bisa diabaikan. Melalui komunikasi yang intim antara raja dan nabi, kita melihat bagaimana Tuhan berupaya membimbing para pemimpin-Nya untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar. Dalam kisah-kisah yang tercatat dalam Kitab 2 Raja-Raja, kita diingatkan akan pentingnya mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, kita dapat belajar bahwa sebagai pemimpin, baik di masa lalu maupun saat ini, mendengarkan nasihat dan peringatan

²³ Yohan Yoo and Minah Kim, "'Korea National Prayer Breakfast' and Protestant Leaders' Prophetic Consciousness during the Period of Military Dictatorship (1962–1987)," *Religion* 9, no. 10 (2018): 308, <https://doi.org/10.3390/rel9100308>.

²⁴ Daniel O. Orogun, "Prophecies in Politics: A Review of Integrity, Impact on Voter-Behaviour and Good Governance," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.4102/hts.v79i2.8685>.

dari Tuhan melalui nabi-Nya adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan kebaikan bagi bangsa. Seperti yang tertulis dalam Amsal 3:5-6, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri; akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ini adalah pengingat yang kuat bagi kita semua, bahwa bimbingan ilahi selalu tersedia bagi mereka yang bersedia mendengarkan dan mengikuti-Nya.

Dampak Agama dalam Kebijakan Sosial

Dalam catatan sejarah yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 23:1-3, kita melihat momen penting dalam perjalanan bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yosia. Dalam pasal tersebut, Yosia mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda dan membacakan kitab hukum di hadapan mereka.²⁵ Tindakan ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi merupakan sebuah pernyataan komitmen yang mendalam terhadap hukum Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik Yosia sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran agama yang dianutnya. Dalam konteks ini, agama tidak hanya menjadi aspek spiritual, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam pembentukan kebijakan sosial yang berdampak luas. Keberanian Yosia untuk mengembalikan fokus kepada hukum Tuhan sangatlah signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa kebangkitan spiritual yang terjadi di masa pemerintahan Yosia membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satu contoh konkret dari perubahan ini adalah penghapusan praktik penyembahan berhala yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Dengan tegas, Yosia menindak praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, seperti penyembahan kepada dewa-dewi asing. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen religius dapat mendorong tindakan yang berani dan transformatif dalam masyarakat.

Perubahan yang dibawa oleh Yosia tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga meluas ke berbagai dimensi sosial. Ketika masyarakat kembali kepada ajaran Tuhan, mereka mulai mengubah cara pandang terhadap kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, masyarakat menjadi lebih peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka.²⁷ Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai pemandu moral yang mengarahkan tindakan sosial ke arah yang lebih positif. Yosia, sebagai pemimpin, tidak hanya berperan sebagai raja, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa harapan baru bagi rakyatnya. Selain itu, tindakan Yosia dalam membacakan kitab hukum juga

²⁵ C. Frevel, "Tradition of Reform as Reform of Tradition: Some Considerations on the Relation of Religion and Reform," *Acta Theologica* 41 (2021): 165–94, <https://doi.org/10.18820/23099089/actat.sup32.11>.

²⁶ Jaeyoung Jeon, *The Levites and Idolatry: A Scribal Debate in Ezekiel 44 and Chronicles* (Berlin: Chronicles and the Priestly Literature of the Hebrew Bible, 2021).

²⁷ Yulianus Bani et al., "Josiah's Reform as a Model of Leadership among the Servants in Batam Based on 2 Kings 22-23: 1-30," *Pharos Journal of Theology* 103, no. 2 (2024): 1–21, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.103.2024>.

menciptakan ruang dialog antara pemimpin dan rakyat. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembacaan dan pemahaman hukum Tuhan, Yosia mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Hal ini menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap nilai-nilai yang dianut, sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Dalam hal ini, kita dapat melihat bagaimana agama dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemimpin dan rakyat, serta membangun solidaritas di antara mereka.

Namun, perubahan yang terjadi di bawah kepemimpinan Yosia tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dari kalangan yang masih terikat pada praktik-praktik lama. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa meskipun agama memiliki kekuatan untuk membawa perubahan, ada juga resistensi yang muncul dari mereka yang tidak ingin meninggalkan cara hidup yang telah menjadi tradisi. Yosia harus berjuang tidak hanya melawan praktik penyembahan berhala, tetapi juga melawan pemikiran dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa transformasi sosial yang dipicu oleh agama memerlukan ketekunan dan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan.

Dalam merenungkan pengaruh agama terhadap kebijakan sosial, kita juga dapat menarik pelajaran dari pengalaman Raja Yosia. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab, "Hukum-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku" (Mazmur 119:105). Ayat ini mengingatkan kita bahwa ajaran Tuhan dapat memberikan petunjuk yang jelas dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks kebijakan sosial, hal ini berarti bahwa pemimpin yang berpegang pada nilai-nilai agama akan mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dan adil.²⁹ Dengan demikian, agama bukan hanya sekadar aspek spiritual, tetapi juga menjadi landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Kita dapat melihat bahwa pengaruh agama dalam kebijakan sosial sangatlah signifikan. Melalui tindakan Raja Yosia yang mengembalikan fokus kepada hukum Tuhan, kita menyaksikan bagaimana agama dapat membawa perubahan yang mendalam dalam masyarakat. Dari penghapusan praktik penyembahan berhala hingga pembentukan nilai-nilai sosial yang lebih baik, semua ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang tak terpisahkan dalam membentuk kebijakan sosial. Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus merenungkan dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 8:61, "Hendaklah hatimu sempurna di hadapan Tuhan, dan

²⁸ Adriaan Duiveman, "Praying for (the) Community : Disasters , Ritual and Solidarity in the Eighteenth-Century Dutch Republic," *Cultural and Social History* 16, no. 5 (2019): 543–60, <https://doi.org/10.1080/14780038.2019.1674619>.

²⁹ Danielle Agyemang, Vilashini Somiah, and Khoo Ying Hooi, "Divine Mandates and Political Realities: Exploring Power, Religion, and Transition in The Gambia," *Africa Spectrum* 59, no. 1 (2024): 69–88, <https://doi.org/10.1177/00020397241230565>.

berjalanlah dalam segala jalan-Nya." Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menjadikan agama sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan sosial yang kita jalankan.

Kesimpulan

Narasi Kitab 2 Raja-Raja, agama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk arah kebijakan politik para raja Israel dan Yehuda. Melalui analisis hermeneutik terhadap beberapa peristiwa penting, seperti reformasi religius pada masa pemerintahan raja Hizkia dan Yosia serta penyimpangan keagamaan pada masa raja Manasye, terlihat bahwa kesetiaan atau penyimpangan terhadap ajaran Tuhan berpengaruh langsung terhadap legitimasi kekuasaan, stabilitas pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakat. Dengan demikian, agama dalam teks tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan spiritual, melainkan juga sebagai kerangka moral dan teologis yang memengaruhi keputusan politik serta arah kebijakan publik yang dijalankan oleh para pemimpin. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Kajian ini berfokus pada analisis teks dalam Kitab 2 Raja-Raja dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dan studi literatur, sehingga pembahasan dibatasi pada interpretasi teologis dan historis dari narasi biblika tersebut. Penelitian ini tidak membahas secara komprehensif seluruh kitab sejarah dalam Perjanjian Lama maupun tidak melakukan perbandingan mendalam dengan dinamika politik dalam konteks modern secara empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat memperluas kajian dengan menganalisis kitab-kitab sejarah lain dalam Alkitab atau mengkaji secara interdisipliner hubungan antara agama dan kebijakan politik dalam konteks masyarakat kontemporer.

Referensi

- Agyemang, Danielle, Vilashini Somiah, and Khoo Ying Hooi. "Divine Mandates and Political Realities: Exploring Power, Religion, and Transition in The Gambia." *Africa Spectrum* 59, no. 1 (2024): 69–88. <https://doi.org/10.1177/00020397241230565>.
- Anderson, Joel E., and Pieter M. Venter. "Isaiah 36-39: Rethinking the Issues of Priority and Historical Reliability." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 65, no. 1 (2009): 49–55. <https://doi.org/10.4102/hts.v65i1.123>.
- Bani, Yulianus, Muner Daliman, Timotius Sukarna, and Daniel Suharto. "Josiah's Reform as a Model of Leadership among the Servants in Batam Based on 2 Kings 22-23: 1-30." *Pharos Journal of Theology* 103, no. 2 (2024): 1–21. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.103.2024>.
- Boloje, Blessing Onoriode. "Trading Yahweh's Word for a Price: Ethical Implications of the Collusion of Prophets and Priests." *Old Testament Essays* 3, no. 3 (2018): 630–50. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2018/v31n3a13>.
- Branch, Robin Gallaher. "Athaliah, a Treacherous Queen: A Careful Analysis of Her Story in 2 Kings 11 and 2 Chronicles 22:10-23:21: Research Article." *In Die Skriflig* 38, no. 4 (2004): 537–59. <https://doi.org/10520/EJC108082>.

- Calfano, Brian Robert, and William Umphres. "Religion Applied to Government: Navigating Competing and Complementary Spheres of Power." *Religion* 13, no. 11 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.3390/rel13111041>.
- Duiveman, Adriaan. "Praying for (the) Community : Disasters , Ritual and Solidarity in the Eighteenth-Century Dutch Republic." *Cultural and Social History* 16, no. 5 (2019): 543–60. <https://doi.org/10.1080/14780038.2019.1674619>.
- Frevel, C. "Tradition of Reform as Reform of Tradition: Some Considerations on the Relation of Religion and Reform." *Acta Theologica* 41 (2021): 165–94. <https://doi.org/10.18820/23099089/actat.sup32.11>.
- Geyser-Fouche, Ananda. "1 and 2 Chronicles as a Discourse of Power." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8011>.
- Gulo, Rezeki Putra, Nelci Mbelanggedo, and Seprianus L. Padakari. "Membentuk Identitas Kristen Yang Toleran : Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Kebhinekaan." *Jurnal Teologi Amreta* 8, no. 2 (2024): 1–27. <https://doi.org/10.54345/jta.v8i1.166>.
- Holmes, Colin, and David Lindsay. "In Search of Christian Theological Research Methodology." *Sage Open* 8, no. 4 (2018): 01–09. <https://doi.org/10.1177/2158244018809214>.
- House, Paul R. *1, 2 Kings : An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture*. USA: B&H Publishing Group, 1995.
- Jeon, Jaeyoung. *The Levites and Idolatry: A Scribal Debate in Ezekiel 44 and Chronicles*. Berlin: Chronicles and the Priestly Literature of the Hebrew Bible, 2021.
- Lemański, Janusz. "Hezekiah and the Centralization of Worship (2 Kgs 18: 4.22)." *Collectanea Theologica* 92, no. 1 (2022): 29–62. <https://doi.org/10.21697/ct.2022.92.1.02>.
- Maspul, Kurniawan Arif. "Faith, Politics, and Democracy: Unraveling Historical and Contemporary Dynamics in Religious Influences on Electoral Processes." *Religion and Policy Journal* 1, no. 2 (2023): 61–65. <https://doi.org/10.15575/rpj.v1i2.628>.
- Onuorah, Chioma P. "Religious Aberration in Nigerian Contemporary Society : A Critique." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7395>.
- Orogun, Daniel O. "Prophecies in Politics: A Review of Integrity, Impact on Voter-Behaviour and Good Governance." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i2.8685>.
- Osajie, Justina Nwazuni. "Religious Leaders as Agents of Peace and Security for Sustainable Development in Nigeria." *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 21, no. 3 (2021): 260–73. <https://doi.org/10.4314/ujah.v21i3.15>.
- Padakari, Seprianus L., and Rezeki Putra Gulo. "Teologi Dan Keadilan Sosial : Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global." *Jurnal Tumou Tou* 12, no. 1 (2025): 41–52. <https://doi.org/10.51667/tt.v12i1.1973>.
- Rantung, Djoys Anake. "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia." *Jurnal Shanan* 1, no. 2 (2017): 58–73. <https://doi.org/10.33541/shanan.v1i2.1492>.
- Reinhardt, Nicole. "Just War, Royal Conscience and the Crisis of Theological Counsel in the

Early Seventeenth Century." *Journal of Early Modern History* 18, no. 5 (2014): 495–521. <https://doi.org/10.1163/15700658-12342427>.

Sidjaba, Binsen S. "Pendidikan Politik: Telaah Materi Ajar Pak Di Perguruan Tinggi Umum." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.20>.

Winarjo, Hendra. "Jesus Christ as The Embodiment of the Wisdom of God: A Theological Commentary on James 3:13-18." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 22, no. 2 (2023): 303–319. <https://doi.org/10.36421/veritas.v22i2.539>.

Yoo, Yohan, and Minah Kim. "'Korea National Prayer Breakfast' and Protestant Leaders' Prophetic Consciousness during the Period of Military Dictatorship (1962–1987)." *Religion* 9, no. 10 (2018): 308. <https://doi.org/10.3390/rel9100308>.

Zai, Nikarni, and Junidar Gulo. "Panggilan Kristen Dalam Politik: Melayani Dengan Integritas Dan Kasih." *Imitatio Christo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2025): 30–45. <https://doi.org/10.63536/imitatiochristo.v1i1.4>.